

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada penelitian yang berjudul "*Analisis Profil dan Masalah Industri Kecil dan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur*" **Mudrajad Kuncoro dan Kusumahadi Widjajanto**, (JEP Vol 6, No 1, 2001), mencoba meneliti seberapa besar pengaruh industri kecil dan rumah tangga dalam pembentukan PDRB dan peran industri kecil dalam menyerap angkatan kerja, serta dapat diinterpretasikan bahwa peran sektor industri kecil semakin nyata dalam perekonomian Kabupaten Ngawi.

Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan mengandalkan pada sejumlah data sekunder. Terutama diperoleh dari Sensus Ekonomi 1996 (SE 96) yang belum diolah dan dilengkapi data dari Cabang Dinas Perindustrian Jawa Timur di Ngawi.

Selanjutnya identifikasi subsektor unggulan dilakukan dengan pendekatan diskriptif analitik. Profil industri kecil dan rumah tangga akan di sajikan, yang di sertai dengan analisis diskriminan, identifikasi masalah yang dihadapi dan perkembangan industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini mempunyai tujuan, *pertama* mengidentifikasi subsektor industri kecil yang menjadi "andalan". Definisi "andalan" adalah tertinggi dilihat dari omset, jumlah tenaga kerja atau unit usaha untuk dikembangkan dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Ngawi. Definisi lain juga digunakan adalah berdasar

Location Quotient, (Arsyad, 1999; Kuncoro, 2000), atau memiliki kaitan antar sektor yang kuat, baik ke depan atau ke belakang, dengan tabel input-output regional, (Kuncoro, 2001). *Kedua*, untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pengelolaan industri kecil di Kabupaten Ngawi supaya dapat digunakan sebagai landasan dalam rangka pengembangan industri selanjutnya. *Ketiga* mengetahui pengaruh krisis ekonomi terhadap perkembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi.

Identifikasi subsektor andalan dilakukan dengan diskriptif data yang tersedia kemudian diamati dominasinya terhadap subsektor-subsektor yang lainnya. Subsektor andalan adalah subsektor yang paling dominan diantara subsektor yang lainnya. Berkaitan dengan industrialisasi maka perlu diperhatikan bahwa industri kecil dan rumah tangga mempunyai peranan penting terutama ditinjau dari tersedianya tenaga kerja yang ada. Selain itu untuk daerah-daerah agraris, industri kecil juga mempunyai peranan penting karena sebagian besar industri kecil mempunyai keterkaitan dengan sektor pertanian dan sumber daya alam setempat lainnya. Di Kabupaten Ngawi yang merupakan daerah agraris dengan mayoritas lahan pertanian dan hutan jati, dipandang sangat cocok untuk pengembangan industri kecil.

Hasil penelitian tersebut adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang dapat menjadi "andalan" untuk dikembangkan (*prioritas*) di Kabupaten Ngawi adalah *pertama* industri yang termasuk dalam industri makanan, minuman dan pengolahan tembakau. *Kedua* industri barang galian bukan logam. *Ketiga* industri pengolahan kayu, bambu, rotan dan sejenisnya. *Keempat* adalah industri tekstil, pakaian jadi dan kulit di mana dari semua tersebut mampu menyumbang bagi

penerimaan PDRB Kabupaten Ngawi. Sedang masalah pokok yang dihadapi industri kecil dan kerajinan rumah tangga adalah masalah modal, pemasaran dan kurangnya keahlian atau tenaga ahli. Masalah pokok tersebut diatasi dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah guna pengembangan dan kemajuan bagi industri kecil di Kabupaten Ngawi.

Pada penelitian yang berjudul "*Analisis Perkembangan Industri Kecil Berdasar Penyusunan Indeks Produktivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta*" **Purwo Yulianto**, mencoba meneliti tingkat produktivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana perkembangannya yang didasarkan pada data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, semua itu diperlukan bagi perhitungan indeks produktivitas sebagai dasar analisis untuk menjawab berbagai permasalahan.

Pengertian Produktivitas adalah konsep sistematis yang berkaitan dengan konversi dari masukan menjadi keluaran dari suatu sistem yang berada pada suatu keadaan tertentu, (Adam, dkk, 1984).

Koepelmen berpendapat bahwa produktivitas adalah hubungan antara keluaran fisik dengan satu atau input fisik yang berkaitan dan digunakan dalam proses produksinya.

Pengertian efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan. Suatu aktifitas dapat dikatakan efisien apabila dapat di peroleh hasil yang sama dengan aktifitas yang lain tetapi sumberdaya yang di gunakan lebih sedikit, atau dapat dikatakan sebagai rasio antara value added dengan outputnya pada periode perhitungan yang sama.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Perhitungan Indeks Produktivitas Total

$$\text{Produktivitas total} = \frac{\text{Output pada periode ke-i}}{\text{Input pada periode ke-I}}$$

Perhitungan Efisiensi

$$\text{Efisiensi total} = \frac{\text{Nilai tambah periode ke-i}}{\text{Output periode ke-i}}$$

Penghitungan Produktivitas Tenaga Kerja

$$\text{Produktivitas TK} = \frac{\text{Value added periode ke-i}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$$

Hasil penelitian tersebut kalau dilihat dari perkembangan tenaga kerja, output, nilai tambah, indeks produktivitas tenaga kerja, efisiensi dan yang dihasilkan untuk investasi baru dan pembangunan industri kecil sandang dan kulit, kerajinan dan umum, dan logam mempunyai prospek yang cerah untuk menjadi produk andalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelitian tersebut perlu adanya pembinaan terhadap sektor industri kecil yang ada, karena memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja cukup besar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada penelitian yang berjudul "*Peran dan Perkembangan Industri Kecil dalam Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" **Rahmat Hidayat**, mencoba meneliti peran industri kecil pada perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya peran industri kecil dalam pembentukan PDRB serta peran

industri kecil bagi penyerapan tenaga kerja. Peran sektor industri kecil semakin nyata dalam perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat menjadi salah satu pengganti dari sektor pertanian dalam mendorong perekonomian.

Dasar pengukuran peran sektor industri kecil dalam perekonomian antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto, artinya berhasil tidaknya pembangunan sektor industri antara lain dapat dilihat dari sumbangan sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Penelitian ini menggunakan cara seberapa besar distribusi persentase dari subsektor lapangan usaha dari tahun ke tahun, jadi tanpa melakukan penghitungan-penghitungan. Dimana data sekunder telah tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, semua itu diperlukan guna mendukung dalam pengambilan keputusan yang sifatnya subyektif dan berdasar pada teori-teori yang telah ada.

Penelitian itu bertujuan, untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri kecil, jumlah angkatan kerja, jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai produksi. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perkembangan industri kecil

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PDRB dari sektor industri mengalami kenaikan tiap tahunnya sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan. Perkembangan unit usaha yang tiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,46 % per tahun, perkembangan sentra industri sebesar 2,39 % per tahun, nilai investasi sebesar 8,18 % pertahun, nilai produksi sebesar 9,38 % per

tahun dan nilai tambah sebesar 10,88 %, penyerapan tenaga kerja sebesar 12,88 % per tahun, kenaikan rata-rata per tahun tersebut yang mendorong pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pembinaan bagi pengembangan industri kecil di Yogyakarta. Dapat diinterpretasikan bahwa peran industri kecil dalam menyerap tenaga kerja, perkembangan unit usaha, nilai investasi, nilai produksi semakin nyata sebagai pengganti sektor pertanian perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah supaya perannya dapat terus ditingkatkan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Pengertian Industrialisasi

Proses Industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam artian tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain, pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri yang sekedar mencapai pembangunan fisik.

Industrialisasi pada hakekatnya adalah pembangunan sistem yang mempunyai dinamika dan kemampuan berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat.

Industrialisasi juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya, memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Hal ini sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Boediono (1987), mengartikan industrialisasi sebagai proses percepatan pertumbuhan produksi barang industri yang dilaksanakan dalam negeri, yang di imbangi dengan pertumbuhan yang serupa dibidang permintaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, (Edy Suandi Hamid, 1994).

Dalam rangka mengukur derajat industrialisasi suatu negara, UNIDO (*United National Industrial Development Organization*, 1974), memilah negara-negara berdasar industrinya atas PDB menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Kelompok negara non industri (*non industrial country*), apabila sumbangan sektor industri (*manufaktur*) terhadap PDB kurang dari 10%.
2. Kelompok negara yang industrinya sedang tumbuh atau dalam proses industrialisasi (*industrializing country*), apabila sumbangan antara 10% hingga 20%.
3. Kelompok negara semi industri (*semi industrialized country*) jika sumbangan antara 20% hingga 30%.
4. Kelompok negara industri (*industrialized country*) apabila kontribusi sektor industri melebihi 30% dari PDB.

3.2. Pengertian Industri

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1984, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk perekayasaan industri. Pengertian industri juga meliputi semua macam perusahaan yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara kimia bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru. Didalamnya termasuk pelayanan, pembentukan (*reparasi*) dan pemasangan (*assembling*) dari pada bagian-bagian barang.

Menurut statistik industri, pengertian industri adalah pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan termasuk jasa-jasa yang melayani usaha industri.

Pada konteks mikro dan organisasi, industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang relatif sejenis, atau mempunyai sifat saling mengganti yang erat, (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Dari pengertian industri di atas, maka industri mencakup segala kegiatan produk yang memproses pembuatan bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun barang jadi, atau kegiatan yang dapat mengubah keadaan barang dari suatu tingkat tertentu ke tingkat yang lain, ke arah peningkatan daya gunanya.

3.3. Klasifikasi Industri

Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut tinjauan atau pendekatan. Di Indonesia, industri digolongkan antara lain berdasarkan kelompok komoditas, berdasar skala usaha dan berdasarkan arus produknya. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan baku internasional klasifikasi industri (*International Standart Of Classification, ISIC*). Penggolongan menurut ISIC ini di dasarkan atas pendekatan kelompok komoditas, yang secara garis besar dibedakan

menjadi 9 golongan sebagaimana tercantum pada tabel 2.1. Penggolongan berdasar ISIC ini terinci lebih lanjut sampai dengan kode atau sandi enam digit.

Tabel 3.1.
Penggolongan Industri Menurut ISIC Dua Digit

Kode	Kelompok Industri
31	Industri makanan, minuman dan tembakau
32	Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
33	Industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga
34	Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
35	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik.
36	Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara
37	Industri logam dasar
38	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya
39	Industri pengolahan lainnya

Sumber: Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. 1997.

Berdasarkan hubungan arus produknya, Departemen Petindustrian dan Perdagangan menggolongkan industri menjadi:

3.3.1. Industri hulu, yang terdiri:

1. Industri kimia dasar.
2. Industri mesin, logam dasar dan elektronika.

3.3.2. Industri bilir yang terdiri:

1. Aneka industri.
2. Industri kecil.

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga, dengan kriteria yang berbeda. Pertama, penggolongan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu:

3.3.3. Industri Dasar

Meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD), yang termasuk dalam IMLD antara lain: industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, besi baja, tembaga dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain: industri pengolahan kayu, dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen dan lain sebagainya.

Ditinjau dari "*misinya*", industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi tepat-guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar seajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

3.3.4. Industri Kecil

Meliputi, industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain), industri galian bukan logam dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).

Pengembangan industri kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan luar negeri (*ekspor*).

3.3.5. Industri Hilir

Industri hilir merupakan kelompok Aneka Industri (AI), meliputi: industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumberdaya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok aneka industri mempunyai "*misi*" meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau teknologi maju.

Kedua, pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yang di pekerjakan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengelompokan dengan cara ini di bedakan menjadi empat yaitu:

1. Industri besar, jika mempekerjakan 100 orang atau lebih.
2. Industri sedang, jika mempekerjakan 20 sampai 99 orang.
3. Industri kecil, jika mempekerjakan 5 sampai 19 orang.
4. Industri kerajinan rumah tangga, jika mempekerjakan kurang dari 3 orang.

3.4. Industri Kecil

3.4.1. Pengertian Industri Kecil

Pada awal perkembangannya, industri kecil berbentuk industri rumah tangga (*home industry*), tempat tinggal dan tempat kerja menjadi satu didalam suatu bangunan tempat tinggal. Semua pekerjaan dari mulai pimpinan, pelaksana produksi dan penjualan dilakukan oleh para anggota keluarga. Modal yang digunakan dalam kegiatan produksi tercampur dengan uang rumah tangga yang diperlukan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Keuntungan maupun kerugian sulit diukur, karena modal untuk produksi serta hasil produksi yang dikonsumsi selalu tercampur.

Industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengelola barang dasar menjadi setengah jadi, menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pemilik.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri kecil adalah industri yang mempunyai investasi di bawah Rp 200.000.000,00 diluar tanah dan bangunan.

Berdasar SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 25 / MPP / Kep / 1997 Tanggal 28 Juli 1997, dimana SK tersebut menjelaskan tentang pengelompokan industri kecil, dimana industri kecil di bagi dalam 3 (tiga) kelompok diantaranya:

1. Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK).
2. Industri Aneka (IA).
3. Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK).

Oleh karena sebagian besar dari industri kecil berada pada strata bawah yang dikelola dan diusahakan oleh masyarakat pedesaan dengan metode produksi yang bersifat padat karya. Menurut rumusan dari ARTEP – ILO (*Asian Employment Programe – International Labor Organization*), terdapat lima karakteristik umum dari industri kecil pedesaan yaitu, (Edy Suandi Hamid, 1997):

1. Bersifat *part time* atau dilakukan sebagai pekerjaan sampingan.
2. Relatif banyak melibatkan tenaga kerja wanita dibandingkan aktifitas di sektor lainnya.
3. Teknologi yang digunakan dalam proses produksinya masih sederhana.
4. Menciptakan struktur ekonomi pedesaan yang bersifat atraktif bagi investasi.
5. Mempunyai kaitan ke belakang maupun ke depan yang erat dengan sektor pertanian.

Berdasarkan studi yang di lakukan oleh Mitzerg serta Musseiman dan Hughes dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri umum keterbelakangan industri kecil meliputi beberapa hal sebagai berikut, (Roos Kities Andadari, 1997):

1. Struktur organisasinya bersifat sederhana atau lebih dari separo di dirikan sebagai usaha pengembangan kecil-kecilan.

2. Margin keuntungan rendah, karena tingkat persaingan yang tinggi.
3. Jumlah tenaga kerjanya terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
4. Skala ekonominya terlalu kecil, sehingga sukar untuk menekan biaya.
5. Memiliki sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadang tidak up to date sehingga sulit menilai kinerjanya.
6. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.
7. Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha atau sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank.
8. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
9. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasarnya cenderung terbatas atau hampir 70% melakukan pemasaran langsung kepada konsumen.

3.4.2. Misi dan Tujuan Industri Kecil

Misi dan tujuan industri kecil dalam tata laksana kehidupan nasional adalah untuk menunjang pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Industri kecil yang umumnya tersebar pada strata bawah dan dikelola oleh masyarakat

pedesaan, juga merupakan sarana yang efektif bagi pembangunan desa yang harus terus dibina pengembangan dan peningkatan produktivitasnya.

Selain itu, industri kecil bertujuan guna mengisi sub sektor industri sedang dan besar, serta mengisi kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya.

3.4.3. Struktur Industri Kecil

Berdasar eksistensi dinamisnya, industri kecil dapat dibagi ke dalam tiga kelompok kategori, yaitu:

1. Industri Lokal

Adalah kelompok industri yang menggantungkan kelangsungan hidup usaha pada pasar setempat yang terbatas, serta relatif tersebar dari segi lokasinya, serta usaha kelompok ini sangat kecil.

2. Industri Sentra

Adalah kelompok industri dari segi satuan unit usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis.

3. Industri Mandiri

Pada dasarnya dapat di diskripsikan sebagai kelompok jenis usaha industri yang masih mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah mendapat kemampuan untuk mengadaptasi teknologi produksi yang tinggi.

3.5. Konsep dan Definisi Tenaga Kerja

Secara praktis pengertian tenaga kerja dibedakan oleh batasan umum. Di Indonesia batasan usia kerja minimal 10 tahun dan tanpa batasan umur maksimal, maka usia penduduk yang berumur dibawah 10 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Usia kerja di Indonesia tidak menganut batasan umur maksimum, karena di Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan dari orang tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta, serta sebagian besar penduduk yang dalam usia pensiun masih aktif dalam kegiatan ekonomi, dan tetap digolongkan sebagai tenaga kerja, (Payaman J. Simanjuntak, 1985). Jadi dari uraian di atas definisi masing-masing yang berkaitan dengan tenaga kerja adalah:

3.5.1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah mereka yang berdasar golongan umur sudah dapat diharapkan mampu bekerja di Indonesia digunakan umur 10 tahun.

3.5.2. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

3.5.3. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun keatas) yang bekerja maupun mencari pekerjaan. Golongan ini secara ekonomi memang tidak aktif dan disebut *non economically active population*.

3.5.4. Bekerja

Penduduk yang di kategorikan sebagai pekerja adalah apabila dia melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan, paling sedikit satu jam yang lalu sebelum pencacahan.

3.5.5. Punya Pekerjaan tetapi Sedang Tidak Bekerja

Penduduk yang bekerja meliputi mereka yang sedang bekerja dan mereka yang punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja.

3.5.6. Pencari Kerja

Penduduk yang digolongkan sebagai pencari kerja adalah:

- 3.5.6.1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan.
- 3.5.6.2. Mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- 3.5.6.3. Mereka yang dibebaskan tugas baik akan dipanggil kembali atau tidak tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- 3.5.6.4. Mereka yang sedang mencari pekerjaan

BAB IV
GAMBARAN KEADAAN WILAYAH
KABUPATEN NGAWI PROPINSI JAWA TIMUR

4.1. Letak Geografis

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan.
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

Letak geografis pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ lintang selatan dan $111^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ bujur timur dengan luas wilayah $\pm 1295,98 \text{ km}^2$. Secara administratif wilayah Kabupaten Ngawi terbagi dalam 17 kecamatan, 4 kelurahan dan 213 desa.

4.2. Keadaan Penduduk dan Agama

Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar. Harus disadari bahwa dengan jumlah penduduk yang besar saja,

bukan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru dapat mengakibatkan bencana, dan dapat menimbulkan gangguan program-program pembangunan yang sedang kita laksanakan bersama.

Pertambahan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan tambahan investasi dan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Hal ini merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup warga negara.

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2002 sebesar 865.627 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar $\pm 1295.98 \text{ km}^2$ maka setiap 1 km^2 dihuni sekitar 668 jiwa.

Mayoritas penduduk Kabupaten Ngawi beragama Islam dengan persentase 99%. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut secara rinci adalah Islam 853.143 jiwa, Katholik 5.661 jiwa, Kristen 6598 jiwa, Hindhu 124 jiwa dan Budha 101 jiwa.

4.3. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Ngawi

4.3.1. Perkembangan PDRB perkapita

Salah satu dari indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah perkembangan PDRB perkapita. PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai proxi dari pendapatan perkapita yang sampai saat ini belum dapat dihitung karena keterbatasan data. Dalam perhitungan PDRB perkapita menggunakan jumlah penduduk hasil survey penduduk antar sensus (SUPAS) 1995.

Berdasarkan harga konstan 1993, PDRB per kapita tahun 2002 sebesar 815.745 ribu rupiah atau meningkat 2,53 % dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 795.576 ribu rupiah. Maka dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Ngawi tiap tahunnya mengalami kenaikan.

4.4. Keadaan Tenaga Kerja

Seperti umumnya daerah-daerah di Indonesia, masalah tenaga kerja di Kabupaten Ngawi merupakan prioritas utama yang harus dipecahkan. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberi perhatian yang lebih serius terhadap lapangan kerja dan ketenaga kerjaan.

Tabel 4.1.
Jumlah Total Angkatan Kerja di Kabupaten Ngawi
Tahun 2000 - 2002
(Juta Jiwa)

No	Jenis	2000	2001	2002
1	Jumlah Angkatan Kerja	449.483	454.694	455.538
2	Tenaga Kerja yang Telah Bekerja	426.336	432.140	433.323
3	Pengangguran	23.147	22.554	22.215

Sumber: Laporan tahunan Depnaker Ngawi, BPS, 2003.

Berdasar tabel diatas jumlah angkatan kerja pada tahun 2001 sebesar 454.694 orang, sedang pada tahun 2002 sebesar 455.538 orang (mengalami kenaikan sebesar 0,18 %). Berdasar jenis kelamin, angkatan kerja laki-laki lebih dominan yaitu sebesar 258.139 orang (57 %), sedang angkatan kerja perempuan sebesar 197.399 orang (43 %). Jumlah penduduk usia 15 tahun yang telah bekerja

sebesar 433.323 orang (53,11 %). Sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 244.075 orang (53,57 %), sedang sektor listrik, gas, air merupakan sektor terkecil menyerap tenaga kerja, yaitu 846 orang (0,2 %).

Jumlah penganggur di Kabupaten Ngawi tahun 2002 sebesar 22.215 orang (2,72 % dari jumlah penduduk). Prosentase terbesar penganggur adalah mereka yang tidak tamat SD dan tamat SD yaitu sebesar 21.015 orang (75 %), sedang lulusan sarjana yang menganggur sebesar 151 orang (0,5 % dari total penganggur).

4.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

Pembangunan industri Kabupaten Ngawi merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi.

Sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki, tujuan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya struktur industri yang kokoh dan seimbang dengan meningkatkan peran sektor industri kecil.
2. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Mengembangkan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga dari segi kualitas maupun kuantitas.

4. Mengembangkan sistem mitra usaha serta meningkatkan hubungan keterkaitan antara industri kecil, menengah, dan besar, serta dengan sektor ekonomi lainnya.
5. Mengembangkan industri dasar, dalam rangka peningkatan struktur industri serta pengembangan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran pembangunan industri di Propinsi Jawa Timur adalah:

1. Menumbuhkan unit usaha baru.
2. Penyerapan tenaga kerja baru khususnya pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
3. Penciptaan wirausaha baru.
4. Pengembangan industri kecil pada daerah tertinggal yang dapat mendorong perekonomian daerah tersebut.

4.6. Keadaan Industri Kecil di Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi memiliki komoditi yang beraneka ragam baik untuk kelompok industri kecil, aneka industri, industri mesin dan logam dasar serta kimia dasar, untuk efektifitasnya pembinaan terpilih beberapa komoditi yang diharapkan mampu mendorong jenis-jenis komoditi yang lain. Pemilihan jenis komoditi tersebut didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja.
2. Memiliki nilai tambah yang besar.
3. Mengolah bahan baku setempat (Kabupaten Ngawi).

4. Prospek pemasaran yang cukup baik.

Adapun komoditi andalan untuk industri kecil terdapat 23 komoditi unggulan sebagai tersebut dalam table 4.6. berikut ini.

Tabel 4.2.
Komoditi Unggulan Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 2002.

No	IHPK	IA	ILMK
1.	Tempe Kedelai Tahu Kedelai Tempe Kripik Mebel Kayu dan Ukir Anyaman Bambu Tikar Pandan Tikar Mendong Kurungan/Sangkar Kemasan/Besek Parut Dinding/Gedeg Anyaman Tas Ledre dan Geti	Batik Tulis Wayang Kulit Pakaian Jadi	Genteng Batu Bata Kapur/Gamping Semen Merah Sabit Cangkul Gelang Monel
Jumlah	13	3	7

Sumber: Laporan tahunan Deperindag Kabupaten Ngawi, 2002.

4.6.1. Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

Cabang industri ini paling banyak menyerap tenaga kerja dan paling banyak menciptakan lapangan usaha, industri tersebut banyak dijumpai di Kecamatan Kedungharjo, Kwadungan, Banjarejo, Pangkur dan Prandon (Sadang). Dalam cabang industri tersebut ada yang menjadikan hasil produksinya sebagai komoditi andalan, diantaranya tempe kripik serta kerajinan mebel kayu, anyaman bambu yang dalam beberapa tahun terakhir dapat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, bahan

baku asli Ngawi yang dapat menunjang perekonomian masyarakat Ngawi pada umumnya.

Prospek pengembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi merupakan potensi yang perlu dibina. Setelah adanya SK Gubernur No. 80 Tahun 1989 tentang rencana induk pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan di Jawa Timur tahun 1989 sampai tahun 2009 dan Peraturan Daeran No 4 tahun 2001 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga yang bertujuan peningkatan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Ngawi.

Berikut ini dapat ditampilkan data perkembangan unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan perkembangan produksi pada komoditi unggulan industri kecil di Kabupaten Ngawi pada tahun 1994-2000, sedangkan pada tahun 2001 sudah digolongkan menurut ISIC dua digit.

Tabel 4.3.
Perkembangan Unit Usaha pada Komoditi Unggulan Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tempe Kedelai	1145	1149	1163	1163	1140	1145	1147
Tahu kedelai	152	154	155	155	152	150	153
Tempe Kripik	28	28	28	31	50	58	59
Mebel Kayu dan Ukir	98	103	103	109	105	102	103
Anyaman Bambu	1521	1526	1526	1526	1524	1524	1528
Tikar Pandan	2660	2663	2664	2664	2666	2665	2669
Tikar Mendong	1968	1971	1988	1988	1990	1988	1991
Kurungan/Sangkar	19	20	21	21	22	22	23
Kemasar/Besek	237	239	239	239	240	238	240
Parut	132	134	134	134	133	131	133
Dinding/Gedeg	1536	1538	1542	1542	1540	1537	1539
Anyaman Gedebog	-	-	-	-	1	1	1
Ledre dan Geti	4	5	5	5	5	6	6

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 1994-2000.

Tabel 4.4.
Perkembangan Tenaga Kerja pada Komoditi Unggulan Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tempe Kedelai	3230	3234	3253	3281	3220	3215	3219
Tahu kedelai	462	468	470	470	462	459	461
Tempe Kripik	157	161	173	152	152	149	150
Mebel Kayu dan Ukir	608	611	611	656	660	657	659
Anyaman Bambu	5258	5261	5288	5288	5288	5285	5289
Tikar Pandan	4248	4253	4254	4254	4254	4251	4253
Tikar Mendong	3998	4002	4021	4021	4021	4017	4019
Kurungan/Sangkar	37	40	59	59	80	77	79
Kemasan/Besek	964	968	968	968	968	963	966
Parut	409	413	413	413	222	217	219
Dinding/Gedeg	2750	2750	2758	2760	2760	2755	2759
Anyaman Gedebog	-	-	-	-	978	973	976
Ledre dan Geti	6	8	8	8	8	6	7

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 1994-2000.

Tabel 4.5.
Perkembangan Produksi pada Komoditi Unggulan Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun							Satuan
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
Tempe Kedelai	6.188.374	6.204.600	6.256.262	6.698.880	6.156.000	6.154.555	6.155.000	Kg
Tahu kedelai	5.264.754	5.266.800	5.267.790	5.022.000	1.094.400	1.000.500	1.050.700	Kg
Tempe Kripik	4.331.525	4.332.000	4.332.000	4.787.640	240.000	238.000	239.500	Kg
Mebel Kayu dan Ukir	2.295	2.318	2.346	4.109	3.958	3.588	3.750	Buah
Anyaman Bambu	5.678.641	5.798.646	5.803.686	5.803.686	5.798.643	5.458.200	5.650.250	Buah
Tikar Pandan	357.565	357.573	357.576	357.576	357.573	357.568	357.569	Buah
Tikar Mendong	132.215	132.223	132.497	132.497	132.223	132.215	132.21	Buah
Kurungan/Sangkar	71.925	72.000	73.726	73.726	18.360	18.250	18.275	Buah
Kemasan/Besek	169.500	170.000	170.000	170.000	170.000	168.250	168.750	Buah
Parut	1.435.700	1.436.900	1.436.900	1.436.900	49.190	49.050	49.100	Buah
Dinding/Gedeg	130.980	131.274	131.370	136.380	136.380	136.150	136.250	Buah
Anyaman Gedebog	2.125	2.250	2.250	2.300	3.900	3.700	3.750	Buah
Ledre dan Geti	7.450	7.650	7.650	7.650	9.000	8.500	8.750	Kg

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 1994-2000.

Pada tahun 2001 sampai tahun 2002 penggolongan komoditi unggulan telah digolongkan menurut ISIC dua digit dan dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Perkembangan Komoditi Unggulan Berdasar ISIC Dua Digit di Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2001-2002.

Sub Sektor	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Produksi (Rp. 000)	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
31. Makanan, Minuman dan Tembakau	1.512	1.517	4.580	4.600	28.018.640	28.579.012
33. Barang dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	8.480	8.488	20.156	20.171	22.085.261	22.747.818

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS Ngawi, 2001-2002.

4.6.2. Industri Aneka

Industri kecil yang tergabung dalam industri aneka banyak terdapat di daerah Banyubiru, Dumplengan, Gelung dan Beran. Sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan kerakyatan jenis ini telah mendapat perhatian khusus dari para investor dari Surabaya. Dimana jenis kerajinan dan bentuk hasilnya tidak ada yang menyamai dari daerah lain yang membuat para investor tertarik.

Pengembangan tersebut telah mendapatkan hasil dimana dalam tahun 2001 telah mengalami ekspor ke Jepang. Pengembangan tersebut bertujuan memperkuat struktur ekonomi rakyat serta sebagai penyumbang PDRB di Kabupaten Ngawi bila dikelola dengan baik.

Pada tabel berikut ini kita dapat melihat perkembangan unit usaha, tenaga kerja dan nilai produksi pada komoditi unggulan di Kabupaten Ngawi pada tahun 1994-2000.

Tabel 4.7.
Perkembangan Unit Usaha pada Komoditi Unggulan di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Batik Tulis	235	236	240	240	240	239	239
Pakaian Jadi	36	36	37	37	54	51	53
Wayang Kulit	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS Ngawi, 1994-2000.

Tabel 4.8.
Perkembangan Tenaga Kerja pada Komoditi Unggulan di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Batik Tulis	435	439	443	443	443	439	439
Pakaian Jadi	81	82	83	83	112	105	108
Wayang Kulit	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS Ngawi, 1994-2000.

Tabel 4.9.
Perkembangan Produksi pada Komoditi Unggulan di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun							Satuan
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
Batik Tulis	55.096	55.196	55.340	55.300	2.736	2.550	2.650	Lembar
Pakaian Jadi	158.850	158.963	159.113	159.100	169.200	168.550	169.050	Potong
Wayang Kulit	157	160	162	162	104	104	106	Buah

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 1994-2000.

Kemudian pada tahun 2001-2002 penggolongan industri sudah didasarkan pada ISIC dua digit, dan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Perkembangan Komoditi Unggulan Berdasar ISIC Dua Digit di Kabupaten Ngawi
Pada Tahun 2001-2002.

Sub Sektor	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Produksi (Rp. 000)	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
32. Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	288	290	566	609	3.289.500	3.322.395

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 2001-2002.

4.6.3. Industri Logam Mesin dan Kimia

Cabang industri ini paling tidak berkembang diantara cabang-cabang industri kecil lainnya. Di samping karena kesulitan dalam pemasaran, hal ini juga karena langkanya bahan baku dan belum adanya perusahaan industri pengolahan yang bergerak dalam logam dasar.

Cabang industri kecil ini banyak terdapat di daerah Paron, Kedunggalar dan Watuwalang. Beberapa komoditas dari industri kecil logam adalah batu bata, genteng dan peralatan pertanian seperti sabit, cangkul, pada akhir ini perkembangan industri ini mengalami penurunan karena lemahnya dalam pemasaran.

Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat perkembangan unit usaha, tenaga kerja dan nilai produksi pada industri kecil logam mesin dan kimia di Kabupaten Ngawi pada tahun 1994-2000, kemudian pada tahun 2001-2002 penggolongan berdasar ISIC dua digit.

Tabel 4.11.
Perkembangan Unit Usaha pada Komoditi Unggulan di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Genteng	1140	1141	1141	1143	1143	1141	1142
Batu Bata	1020	1022	1030	1030	1030	1029	1029
Kapur/Gamping	82	82	86	86	86	84	85
Semen Merah	8	9	9	9	9	9	9
Sabit	119	120	120	120	141	139	139
Cangkul	18	21	21	21	15	13	13
Gelang Monel	18	19	19	19	19	19	19

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 1994-2000.

Tabel 4.12.
Perkembangan Tenaga Kerja pada Komoditi Unggulan di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Genteng	4.275	4.350	4.352	4.356	6.436	5.950	6.075
Batu Bata	3.045	3.157	3.174	3.174	3.174	3.025	3.065
Kapur/Gamping	254	256	268	268	268	264	265
Semen Merah	14	15	15	15	15	15	15
Sabit	325	338	338	338	408	385	395
Cangkul	63	70	70	30	15	14	15
Gelang Monel	47	50	50	50	50	50	50

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS, 1994-2000.

Tabel 4.13.
Perkembangan Produksi pada Komoditi Unggulan di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994-2000.

Jenis Komoditi Unggulan	Tahun							Satuan
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
Genteng	44.100.000	44.421.000	44.210.000	44.431.000	55.020.000	56.050.000	57.550.000	Buah
Batu Bata	4.825.000	5.105.000	5.156.500	5.156.500	5.810.000	5.025.000	5.650.058	Buah
Kapur/Gamping	2.085	2.170	2.183	2.188	1.184	1.0958	1.110	Ton
Semen Merah	3.452.000	3.656.250	3.656.250	3.656.000	3.656.000	3.450.000	3.550.656	M ³
Sabit	437.500	439.022	439.022	439.000	176.400	173.250	174.024	Buah
Cangkul	9.350	10.048	10.048	10.000	7.200	6.555	6.950	Buah
Gelang Monel	10.325.000	11.374.500	11.374.500	9.300.000	2.085	1.850	2.500	Buah

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS Ngawi, 1994-2000.

Pada tahun 2001-2002 penggolongan industri kecil digolongkan dalam ISIC dua digit maka dapat di tampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Perkembangan Komoditi Unggulan Berdasar ISIC Dua Digit di Kabupaten Ngawi
Pada Tahun 2001-2002.

Sub Sektor	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
36. Semen dan Bahan Galian Bukan Logam	2.428	2.428	8.381	8.381	6.761.969	6.896.929
37. Logam Dasar Besi dan Baja	314	314	710	710	1.978.942	2.018.520

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, BPS Ngawi, 2001-2002.

4.7. Permasalahan Industri Kecil

Industri kecil di Indonesia ditinjau dari segi kuantitas banyak sekali jumlahnya serta memiliki variasi dan karakteristik masing-masing. Namun permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil secara umum dapat digolongkan menjadi dua kriteria, yaitu permasalahan ditinjau dari segi internal industri kecil dan permasalahan yang ditinjau dari segi eksternal industri kecil.

Di samping permasalahan yang melekat pada industri kecil tersebut, faktor lain yang memprihatinkan adalah kelemahan dalam hal pembinaan. Batasan wewenang antar instansi yang membina kurang jelas sehingga mengakibatkan kinerja dari instansi tersebut menjadi kurang jelas.

4.7.1. Permasalahan Ditinjau dari Internal Industri Kecil

Permasalahan internal yang disajikan umumnya merupakan masalah yang banyak dijumpai pada industri kecil dan pengaruhnya cukup menentukan bagi perkembangannya.

1. Sikap Mental Usaha

Sikap mental usaha yang baik masih belum banyak di miliki sebagian pengusaha. Ciri-ciri yang di gunakan untuk membedakan sikap mental usaha ini untuk klasifikasi kurang baik, antara lain adalah cepat merasa puas dengan hasil yang sudah di peroleh, hidup boros dan konsumtif, sulit menerima hal-hal yang baru serta cepat putus asa.

Belum adanya sikap mental yang baik dalam usaha, umumnya sangat mempengaruhi perkembangan unit usaha yang ada. Penyebab hal ini adalah usia pengusaha yang sudah lanjut, tingkat pendidikan rendah, serta berpegang pada tradisi yang terkadang sudah tidak sesuai dengan pola produksi yang cepat perkembangannya.

2. Manajemen

Masalah menyangkut manajemen yang sering dihadapi adalah kurangnya pengetahuan mengenai manajemen dan fungsinya. Kemampuan manajemen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengusaha, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman usaha juga merupakan modal praktis dalam mendukung pengembangan usaha.

3. Produksi

Industri kecil di Kabupaten Ngawi dalam proses produksi pada umumnya masih menggunakan peralatan yang bersifat tradisional, sehingga hasil produksi kurang maksimal yang hanya mampu mengisi konsumsi lokal.

Di samping tingkat ketrampilan dan tingkat pendidikan yang masih rendah, dalam hal produksi industri kecil di Kabupaten Ngawi juga mengalami kesulitan dalam hal penyediaan bahan baku. Karena kesulitan modal, industri kecil tidak mampu menyediakan bahan baku untuk berproduksi dalam jumlah yang besar.

Belum adanya standar kualitas untuk tiap-tiap produksi menimbulkan kesulitan dan keraguan bagi pengusaha untuk mengetahui kualitas produk yang di hasilkan. Kualitas sering ditentukan atas perjanjian dengan pihak pemesan yang kenyataannya belum memenuhi standar kualitas yang baik.

4. Permodalan

Kesulitan modal yang dihadapi industri kecil, umumnya dikarenakan industri kecil berbentuk perusahaan rumah tangga dan relatif kecil, hal ini menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak lain. Tidak adanya pemisahan modal perusahaan dengan kekayaan pribadi juga mengakibatkan kurang efektifnya produksi perusahaan. Hal ini disadari atau tidak, modal usaha di gunakan untuk keperluan pribadi tanpa perhitungan dan catatan yang jelas.

Kesulitan ini juga karena kurangnya akses untuk mendapatkan modal dari pemerintah atau perbankan, walaupun ada industri kecil yang memanfaatkan fasilitas

dari pemerintah namun birokrasi yang dihadapi terlalu berbelit dan memerlukan waktu yang lama.

5. Pemasaran

Barang-barang yang diproduksi oleh industri kecil merupakan barang akhir, yaitu barang yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Walaupun demikian ada juga produksi yang dimanfaatkan oleh perusahaan lain sebagai bahan mentah atau bahan penolong.

Pemasaran hasil produksi industri kecil dilakukan secara: *pemasaran langsung*, yaitu pemilik perusahaan melakukan sendiri penjualan ke pasar atau konsumen. *Pemasaran tak langsung*, yaitu pemasaran melalui tengkulak atau pengumpul.

Kesulitan menjual produk terutama penjualan secara tunai, disebabkan karena kurang mengetahui saluran distribusi, kurang mendapat informasi pasar, kurangnya promosi, serta timbulnya persaingan dengan perusahaan sejenis yang lebih besar.

4.7.2. Permasalahan Ditinjau dari Eksternal Industri Kecil.

Dalam melaksanakan kegiatan industri kecil juga tidak lepas dari faktor-faktor eksternal yang mempunyai pengaruh luas terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kenyataan menunjukkan bahwa pengusaha industri kecil belum mampu mengatasinya, sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain.

Hal mencolok yang menjadi permasalahan eksternal bagi usaha industri kecil adalah permasalahan struktural, yaitu masih diskriminatifnya pemerintah dalam membina dan mengembangkan jenis industri di Indonesia. Dalam pola pikir pemerintah yang pragmatis, yaitu untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, semua daya dan upaya pemerintah hanya dicurahkan pada usaha besar yang memang memiliki nilai tambah tinggi. Namun akibat yang ditimbulkan adalah tumbuhnya segelintir pengusaha jago kandang atau konglomerat yang besar karena fasilitas dan proteksi dari pemerintah dan akibat selanjutnya adalah kesenjangan yang besar antara pengusaha kecil dan pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan.

Salah satu cara untuk menelusuri penyebab struktural keterbelakangan industri kecil yang sekaligus merupakan permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh usaha industri kecil adalah dengan memahami karakteristik kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Menurut Robison (1986), kapitalisme di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap negara, antara lain dalam bentuk fasilitas usaha dan pengerjaan proyek-proyek negara.

Dalam studinya mengenai perkembangan kapitalisme di Asia Tenggara, Yosihara Kunio menyebut kapitalisme yang berkembang adalah kapitalisme semu (*ersatz capitalisem*), yaitu suatu bentuk kapitalisme pengganti yang bersifat inferior yang tumbuh dan berkembang karena adanya proteksi dari negara. Penyebab inferioritas itu adalah adalah campur tangan negara yang sangat besar dalam perekonomian.

Berikut ini uraian singkat dari sikap diskriminatif pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan sektor industri. Kebijakan yang dikeluarkan banyak yang tidak menyentuh dengan permasalahan yang dihadapi oleh usaha industri kecil.

Dalam hal bea masuk impor belum dirasakan manfaatnya oleh usaha industri kecil, karena mekanisme pasar yang dikuasai oleh usaha besar. Manfaat tersebut dirasakan secara tidak langsung sepanjang terdapat hubungan usaha dengan perusahaan yang lebih besar. Walaupun bea masuk impor oleh industri kecil tidak banyak dirasakan, tetapi sangat erat hubungannya dengan harga komoditi industri dalam negeri yang berhubungan dengan komoditi impor.

Mengenai harga patokan impor masalahnya terletak pada keterkaitan usaha industri kecil dan importir dengan saluran distribusinya. Semakin kuat kerja sama usaha semakin banyak manfaat yang dirasakan, sebaliknya semakin sedikit kerjasama, maka semakin sedikit manfaat yang dirasakan.

Kebijakan pemerintah untuk merangsang ekspor, baru dirasakan sepanjang komoditi yang dihasilkan dapat diekspor. Keterkaitan dengan jaringan-jaringan eksportir yang lebih menguasai keadaan pasar dimana industri kecil belum mampu memasukinya.

Industri kecil banyak yang belum terkena pajak, baik karena persyaratan tertentu maupun karena kurangnya kesadaran. Pajak yang dikenakan dirasakan masih terlalu berat, dengan pertimbangan hasil dibandingkan dengan pengeluaran termasuk pajak.

Pengusaha industri kecil mengalami kesulitan dalam hal persaingan, terutama dari hasil produksi perusahaan besar. Keadaan ini akan lebih parah jika tidak ada pengaturan mengenai industri baru yang tumbuh dan masuk kedalam pasar yang diproduksi oleh industri kecil.

Dalam hal perijinan, hanya sedikit pengusaha yang merasakan kesulitan, tetapi masih dirasakan melewati prosedur yang panjang. Selain itu adanya keistimewaan bebas ijin sering dimanfaatkan para pengusaha yang sudah tergolong wajib pajak.

Adapun permasalahan secara eksternal bagi peningkatan industri kecil di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat pada umumnya.

Pada kondisi tersebut telah diterbitkannya Undang - Undang No 8 tahun 1999 dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen. Hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat bagi peredaran barang di masyarakat atau pasaran lebih berkualitas.

2. Terbatasnya informasi yang menggambarkan terbukanya peluang pasar.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menerbitkan suatu buletin yaitu Profil Potensi Daerah Kabupaten Ngawi, dimana akan menyertakan perkembangan industri kecil pada tiap tahunnya dan disertakan dalam laporan tahunan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi. Dimana akan memberi informasi bagi pelaku dunia usaha untuk menggarap potensi daerah.

3. Kurangnya lembaga pendidikan untuk manajemen wirausaha.

Permasalahan tersebut telah di usahakan agar terjadi suatu solusi yaitu dengan mengadakan pelatihan dalam pengelolaan usaha dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi yaitu pada industri kecil tempe, genteng, dll.

BAB V

ANALISA DATA

5.1. Diskripsi Data

Sasaran dari obyek penelitian ini adalah kelompok industri kecil yang berada di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi, Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi dan sumber lain yang terkait dan relevan dengan obyek yang diteliti di mulai tahun 1994 – 2002.

Data-data yang di kumpulkan adalah jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri kecil, jumlah angkatan kerja, jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai produksi, perkembangan nilai tambah serta jumlah sentra usaha (lampiran). Data-data tersebut digunakan untuk menganalisa peran dan perkembangan industri kecil serta bagaimana dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini dasar yang digunakan adalah dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang mendefinisikan industri kecil yang mempunyai investasi dibawah Rp. 200.000.000,00 diluar tanah dan bangunan.

5.2. Kebijakan dan Kegiatan Pengembangan Industri Kecil

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa

Rencana Starategis merupakan suatu proses yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan bagi peningkatan sector industri yang ada di Wilayah Kabupaten Ngawi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melaksanakan hal tersebut melalui Departeman Perindustrian dan Perdagangan.

Pada pelaksanaan teknis dan pengembangan, pembinaan dan pengaturan industri kecil adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedang pada tingkat Propinsi dan Kabupaten adalah Kanwil atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerjasama dengan departemen-departemen lain yang terkait serta lembaga non pemerintah.

Kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan, pembinaan dan pengaturan sektor industri kecil di Kabupaten Ngawi tidak lepas dari kebijakan dan sterategi yang dirancang oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam usaha pembinaan industri kecil, antara lain:

- Cabang Dinas Perindustrian.
- Dinas Koperasi.
- Perbankan.
- Bagian Perekonomian.
- Departemen Tenaga Kerja.
- Bangdes.

Kerjasama antar instansi diatas dapat dilihat pada tabel 5.1. yang menunjukkan peran masing-masing instansi yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Kebijakan-kebijakan dan kegiatan program kerja di dalam pengembangan, pembinaan dan pengaturan industri kecil di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

5.2.1. Penetapan Skala Prioritas

Mengacu pada Surat Keputusan Bupati No 4 tahun 2001 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi menyusun Visi dan Misi bagi pengembangan industri kecil. Adapun visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi yaitu *"Terwujudnya industri perdagangan dan penanaman modal yang tangguh dan berdaya saing serta bertumpu pada sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai masyarakat yang bertaqwa, mandiri, aman, sejahtera yang berakar pada ekonomi kerakyatan dan mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri"*. Kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, perlu ditetapkan skala prioritas agar terdapat pelaksanaan yang efisien, efektif dan segera nampak outputnya. Pemilihan prioritas pembinaan dan pengembangan industri kecil didasarkan pada kriteria-kriteria berikut:

- Komoditi yang mempunyai prospek pengembangan cukup besar.
- Komoditi yang merupakan kebutuhan rakyat banyak.
- Komoditi yang menggunakan bahan baku lokal atau mudah pengadaannya.
- Industri kecil yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

- Industri kecil yang mempunyai keterkaitan dengan industri menengah dan industri besar serta dengan sektor ekonomi lainnya.
- Industri kecil yang menunjang ekspor non migas.
- Industri kecil dan kerajinan guna pelestarian seni budaya nasional.

5.2.2. Peningkatan Kemampuan Usaha

Adapun Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi yang telah ditetapkan adalah *“Meningkatkan kegiatan industri perdagangan dan penanaman modal yang ditunjang oleh peningkatan iklim usaha yang kondusif, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan”*.

Dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha dari unit usaha industri kecil diambil langkah kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan produktifitas dan peran serta masyarakat agar ikut serta melaksanakan pembangunan secara periodik bertindak sebagai fasilitator pembangunan.
- Melihat kondisi dan potensi yang ada, maka strategi pembangunan industri perdagangan dan penanaman modal lebih diarahkan pada pemberdayaan industri perdagangan dan penanaman modal kecil dan menengah.
- Meningkatkan kemampuan aparatur dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia dari Pengrajin Industri Kecil dan Menengah (PIKM) atau pengrajin yang ada di Kabupaten Ngawi.

- Meningkatkan sikap mental usaha.
- Pelatihan motivasi di desa kerajinan binaan baru.
- Meningkatkan ketrampilan, metode kerja dan manajemen usaha.
- Motivasi peningkatan produktivitas dan peralatan.
- Mengusahakan diversifikasi produk.

Beberapa kegiatan dalam upaya peningkatan ketrampilan teknis dan teknologi yang telah dilaksanaka oleh pemerintah, antara lain:

- Pelatihan peningkatan teknologi di desa kerajinan binaan lanjutan di desa Kedungharjo, Pangkur, Banyubiru dan desa Purwosari.
- Pembinaan dalam rangka pengendalian pengolahan limbah industri se-Kabupaten Ngawi di desa Pucangan.
- Pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas industri kecil di desa Karangtengah Prandon.
- Pelatihan dan bimbingan keterampilan industri kecil tempe kripiik di desa Sadang,dan desa Karangtengah Prandon.
- Pelatihan dan pengembangan desain industri kecil ukir mebel di desa Kedungharjo dan desa Kwadungan.
- Pelatihan teknik anyam bambu dan plastik di desa Jatipuro, Gembol dan desa Pangkur.
- Pelatihan seni batik tulis kreasi baru di desa Banyubiru.

Untuk lebih meningkatkan dan pengoptimalan peran lembaga swadaya dan instansi terkait maka di laksanakan pembinaan langsung oleh lembaga di bawah

di bawah Kantor Perekonomian Daerah Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Ekonomi Jawa Timur.

Pada tahun 2002, program tersebut telah menentukan obyek binaan sebanyak 24 perusahaan dan industri kecil. Di mana mencakup komoditi kerajinan kayu antik, mebel, batik tulis, anyaman bambu, serta komoditi gerabah tanah liat.

5.2.3. Penyediaan Fasilitas Permodalan

Usaha meningkatkan kemampuan akses terhadap permodalan, antara lain diupayakan dengan penyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana, berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan kredit yaitu: KUT, KKUD, KUK, Modal Bergulir, Kredit Mikro, 20 % dari total kredit perbankan, dan sebagainya.

Pemerintah juga memberikan kemudahan fasilitas pendanaan berasal dari non bank, antara lain: KCK, Usaha Simpan Pinjam Koperasi, alokasi 10 % dari anggaran pemerintah untuk pembelanjaan produk industri kecil (Kepres No. 16 / tahun 1994).

Sesuai dengan UU No. 9 / tahun 1995 tentang usaha kecil, dalam membantu usaha kecil dalam memperoleh akses terhadap lembaga pembiayaan dan perbankan, pemerintah mendirikan PT. PKPI (Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia), pada tanggal 21 Juli 1997 dengan ijin dari Departemen Keuangan No. 328/KMK/017/1997. Tujuan dari pendirian PT. PKPI adalah: untuk lebih menyederhanakan proses permohonan dana, sebagai proses penurunan resiko berusaha, membantu BUMN memperoleh nasabah beresiko rendah,

serta membantu mengupayakan tercapainya penyaluran kredit dari bank sebesar 20%, (Mahfud Jakile, 1998).

Keputusan Bupati No 254 / KMK / 015 / 2002 tentang kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pengurangan daftar negatif investasi serta penyederhanaan prosedur dalam rangka untuk meningkatkan penanaman modal, guna mengembangkan kehidupan usaha. Dalam hal ini bekerjasama dengan Bank Mandiri Cabang Madiun, serta dapat dilihat jumlah penanaman modal yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan - kegiatan usaha ekonomi pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Penyaluran Kredit Investasi di Kabupaten Ngawi
Tahun 2000.

No	Nama Perusahaan	Plafon Kredit	Alamat	Jenis Usaha
1.	Tunggal Kurnia	Rp. 15.000.000,-	Ds. Jenggerk, Kedunggalar	Sangkar Burung
2.	Tunas Karya	Rp. 22.000.000,-	Ds. Gunungsari, Padas	Anyaman Bambu
3.	Maju Sukses	Rp. 15.000.000,-	Ds. Banyubiru, Widodaren	Pres Batu Bata
4.	Sinar Mentari	Rp. 22.500.000,-	Ds. Banyubiru, Widodaren	Batik Tulis
5.	Handayani	Rp. 26.000.000,-	Ds. Ploso, Kendal	Kayu Antik
6.	IKA	Rp. 20.000.000,-	Ds. Walikukun, Widodaren	Mebel dan ukir Gembol
7.	Barokah Illahi	Rp. 10.000.000,-	Ds. Kasreman, Geneng	Wayang
8.	Unggul Pertiwi	Rp. 15.000.000,-	Ds. Jogorogo, Jogorogo	Pres Genteng
9.	Sumber Ilham	Rp. 22.500.000,-	Ds. KRT Prandon, Ngawi	Kripik Tempe
10.	LP2ED	Rp. 15.000.000,-	Perumnas L I, Ngawi	Ledre dan Geti
11.	Bina Usaha Mandiri	Rp. 13.500.000,-	Ds. Banyubiru, Widodaren	Ukir Gembol
	Jumlah	Rp. 196.500.000,-		

Sumber: Rencana Strategi Deperindag Ngawi, 2000.

Dalam hal kebijakan penyediaan fasilitas permodalan bagi usaha industri kecil sering terjadi situasi yang membingungkan bagi para pengusaha industri kecil. Hal ini karena berbagai macam definisi dan kriteria usaha kecil di Indonesia, implikasinya kelompok industri mana yang mendapat fasilitas permodalan tersebut dan kelompok mana yang harus tersingkir dengan tidak dapat menikmati fasilitas.

Pada perkembangannya masalah permodalan menjadi masalah yang utama pada pola pengembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi, maka pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Keputusan Bupati No 188 / 236 / P / 415.011/ 2003, yang berisi tentang Proyek Daerah bagi penyediaan fasilitas permodalan bagi industri kecil pada 26 UKM pada triwulan pertama sebesar Rp. 630.000.000,00 bagi peningkatan dan pengembangan kualitas industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

5.2.4. Penciptaan Iklim Usaha

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan lebih *favourable* bagi perkembangan industri kecil diwujudkan melalui tekad pemerintah untuk meningkatkan peran industri kecil dalam perekonomian nasional dengan di keluarkannya UU. No. 9 / tahun 1995 tentang usaha kecil.

Melalui undang-undang ini pemerintah mengupayakan pertumbuhan industri kecil dengan penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek; pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan. Di dalam hubungan ini, termasuk pula penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan Pusat Pertumbuhan Regional yang di tetapkan Pemda Kabupaten Ngawi.

Dalam usaha penciptaan iklim usaha yang sehat, Pemda Kabupaten Ngawi melaksanakan program Lomba Produk Unggulan Ngawi yang dilaksanakan setiap tahun pada hari jadi Kabupaten Ngawi, Lomba Cipta Kerajinan Bambu dan Ukir Mebel Ngawi pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dimana bekerjasama dengan Dewan Kerajina Nasional (DEKERNAS) Propinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 565 peserta, yang meliputi berbagai jenis kerajinan antara lain, kerajina kayu, bambu, gerabah, batik, kulit, tempe kripik dan lain-lain. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah bantuan bagi peningkatan iklim usaha industri kecil di Kabupaten Ngawi.

Tabel 5.2.
Program Bantuan Peningkatan Iklim Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di
Kabupaten Ngawi
Tahun 2002.

Proyek	Input	Output	Keterangan
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Industri Kecil, Rumah Tangga dan Menengah. Kegiatan:			
1. Bantuan stimulan 1 unit mesin cangklong.	DIP Rp. 5.000.000,-	Hasil produk jahitan lebih rapi.	1 K Sepatu.
2. Pelatihan dan bantuan stimulan 2 unit mesin pengupas kedelai.	DIP Rp. 7.500.000,-	Proses pembersihan kedelai lebih cepat dan lebih higienis serta kapasitas produksi meningkat.	1 K Tempe.
3. Pelatihan desain baru, kerjasama dengan perguruan tinggi.	DIP Rp. 10.000.000,-	Mengenal desain baru mebel serta mengerti cara mengelola usaha dengan benar.	1 K Mebel.
4. Pelatihan industri tempe kriuk.	DIP Rp. 3.000.000,-	Mengerti cara pembuatan kriuk tempe yang baik dan mengelola usaha dengan baik dan benar.	1 K Tempe Kriuk.
5. Pelatihan dan bantuan stimulan 1 unit mesin pres genteng.	DIP Rp. 7.375.000,-	Kapasitas produksi meningkat. Mengetahui cara mengelola usaha dengan benar.	1 K Genteng.
6. Sosialisasi Undang-Undang No 8 tahun 1999.	DIP Rp. 7.500.000,-	Meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai produsen dan konsumen	Perwakilan masing-masing subsektor industri kecil.
7. Pembuatan Profil Dunia Usaha Kabupaten Ngawi.	DIP Rp. 7.500.000,-	Tersebar nya informasi tentang dunia usaha di Kabupaten Ngawi.	Potensi masing-masing industri kecil.
8. Mengikuti pameran industri kecil.	DIP Rp. 7.000.000,-	Memasarkan produk unggulan.	Perwakilan masing-masing industri kecil yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Ngawi.
9. Penyuluhan tentang penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri.	DIP Rp. 9.500.000,-	Ada perubahan dan pengetahuan dalam menangani akibat pencemaran.	Perwakilan sektor industri kecil yang ditunjuk Pemerintah Daerah Ngawi.

Sumber: Rencana Strategi Deperindag Ngawi, 2000.

5.2.5. Promosi dan Informasi

Usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan lebih luas produk-produk hasil sektor industri kecil, sekaligus membuka kemungkinan perluasan pemasaran. Pemda Kabupaten Ngawi telah mengikuti dan melaksanakan kegiatan dalam bentuk pameran, baik lokal, nasional maupun pameran internasional, yang di antaranya sebagai berikut:

- Pameran Pekan Kerajinan tingkat Kabupaten.
- Pameran “Kerajinan Daerah Ngawi” di Jakarta.
- Pameran Industri pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke 644.
- Pameran “Produk Unggulan Kabupaten Ngawi” di Bali.
- Pameran Perdagangan dan Industri Kecil Internasional di Jakarta pada Juni 2002.
- Pameran Ukir Kayu di Jepara.

Pada penyediaan informasi diupayakan melalui pembentukan jaringan usaha kecil menengah Jawa Timur dengan memanfaatkan proyek data di Internet dari pemda Jawa Timur dan jaringan informasi bisnis serta menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi. Proyek tersebut dapat diakses melalui webside *www. Jatim.go.id*, disitu akan ditampilkan per- Kabupaten yang ada di Wilayah Jawa Timur dan produk unggulan masing-masing Kabupaten.

5.2.6. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pelaksanaan dalam pengendalian dan penanggulangan lingkungan akibat kegiatan industri mengacu pada SK Menteri Perindustrian No. 20 / M/ SK / 1 / 1986,

tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian dalam Pengendalian Pencemaran Industri terhadap Lingkungan Hidup.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Ngawi pada tahun 1995 telah melaksanakan secara sektoral maupun melalui koordinasi dengan instansi terkait yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan penyuluhan secara rutin dan berkala untuk industri kecil yang berpotensi pencemaran lingkungan.
- Menghadiri presentasi AMDAL perusahaan industri yang wajib AMDAL berdasar SK Menteri Perindustrian No. 134 / M / SK / IV / 1988, tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan yang diselenggarakan oleh Komisi AMDAL Propinsi Jawa Timur tiap 1 tahun sekali.
- Menindaklanjuti laporan hasil penelitian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Jawa Timur, tentang hasil uji laboratorium limbah cair, padat, gas, dan kebisingan perusahaan-perusahaan yang melebihi NAB (Nilai Ambang Batas). Maka pada tahun 1997 sudah diadakan penataan dan pengujian yang baik.
- Cabang Dinas Perindustrian telah melaksanakan pemantauan pencemaran di masing-masing industri kecil yang memiliki potensi pencemaran seperti industri kecil tempe, tahu, dan batik tulis.

5.2.7. Mengembangkan dan Meningkatkan Program Kemitraan

Usaha dalam meningkatkan dan mengembangkan kemitraan usaha serta menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendorong usaha menengah dan usaha besar untuk menjalin kemitraan melalui berbagai pola kemitraan dengan prinsip saling menguatkan dan saling menguntungkan.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengartikan sistem kemitraan dapat berupa, perusahaan besar atau sedang yang membantu memasarkan produk industri kecil, disertai dengan bantuan pembinaan yang diperlukan seperti; peningkatan kemampuan teknik dan manajemen usaha, bantuan penyediaan bahan baku dan mesin peralatan, serta bertindak sebagai penjamin kredit, (Edy Suandi Hamid,1997).

Pola kemitraan yang dikembangkan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, pola keterkaitan langsung dan pola keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung meliputi: (1) Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dimana bapak angkat sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma, (2) Pola dagang, dimana bapak angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usaha, (3) Pola vendor, dimana produk yang dihasilkan mitra usaha tidak memiliki hubungan kaitan dengan produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya, (4) Pola sub-kontrak, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha bapak angkat, (Mudrajad Kuncoro, 1996).

Sedangkan pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni, dimana tidak ada hubungan bisnis langsung antara pembina dengan usaha binaannya, biasa dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi.

Program keterkaitan Bapak Angkat – Mitra Usaha industri kecil telah dilaksanakan dengan baik, hingga akhir tahun 2002 Bapak Angkat telah menjalin kerjasama sebanyak 22 perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN, sedang Mitra Usaha industri kecil yang telah menjalin kerjasama dengan Bapak Angkat sebanyak 306 unit usaha.

Perkembangan program Bapak Angkat dan Mitra Usaha industri kecil di Kabupaten Ngawi dapat dilihat dalam tabel 5.3. berikut:

Tabel 5.3.
Perkembangan Bapak Angkat – Mitra Usaha Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 – 2002.

Tahun	Bapak Angkat	Kenaikan	Mitra Usaha	Kenaikan	%
1994	11	-	28	-	-
1995	12	1	52	24	5,7
1996	14	2	92	40	6,9
1997	20	6	128	36	9,1
1998	20	0	159	31	4,2
1999	21	1	187	28	7,6
2000	22	1	285	98	2,4
2001	22	0	300	15	5,2
2002	22	0	306	6	2,0

Sumber: Laporan Tahunan Dinkop Ngawi, 1994-2002.

Berdasar nilai bantuan yang diberikan melalui program tersebut diatas di gunakan bagi peningkatan usaha setiap anggotanya, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan seperti pemasaran, modal kerja, diklat penyuluhan, dan lain-lain.

Beberapa program pengembangan dan peningkatan program kemitraan antara lain :

- Pada tanggal 25 April 1996 dibentuk Forum Komunikasi Bapak Angkat Mitra Usaha Industri Kecil se- Kabupaten Ngawi. Dalam forum ini berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan program keterkaitan tersebut dibahas bersama antara kedua belah pihak serta instansi atau lembaga terkait.
- Menyusun dan membahas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Menyelenggarakan pameran bersama tiap tahun.

5.3. Peran Industri Kecil dalam Pembentukan PDRB

Dasar pengukuran peran sektor industri dalam perekonomian antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto, artinya berhasil atau tidaknya pembangunan sektor industri antara lain dapat dilihat dari sumbangan sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Dari data Badan Pusat Statistik Cabang Ngawi, sumbangan sektor industri terhadap PDRB terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 1997 dan tahun 1998 mengalami penurunan karena adanya krisis ekonomi yang menyebabkan penerimaan mengalami penurunan, tapi pada tahun 1999 sampai tahun 2002 mengalami kenaikan.

Tabel 5.4.
Perbandingan Sumbangan Sektor Industri dan Sektor Pertanian terhadap PDRB
Berdasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 – 2002

(000)

Tahun	PDRB	Sektor Industri	%	Sektor Pertanian	%
1994	604.135.300	36.113.400	5,98	257.847.050	42,68
1995	637.721.270	38.707.710	6,07	270.078.100	42,35
1996	681.733.430	42.948.970	6,30	272.778.530	40,01
1997	709.257.430	40.681.890	5,74	283.743.810	40,00
1998	665.282.820	39.939.900	6,00	270.245.700	40,62
1999	672.132.140	41.599.140	6,19	275.305.620	40,96
2000	682.512.220	42.126.500	6,17	284.656.690	41,70
2001	702.746.390	42.944.700	6,11	288.521.320	41,05
2002	710.952.630	43.741.190	6,15	288.907.790	40,63

Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka, BPS, berbagai tahun.

Tabel 5.5.
Perbandingan Sumbangan Sektor Industri dan Sektor Pertanian terhadap PDRB
Berdasar Harga Berlaku 1993 di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 - 2002

(000)

Tahun	PDRB	Sektor Industri	%	Sektor Pertanian	%
1994	658.780.830	37.044.040	5,62	290.315.250	44,07
1995	751.499.080	41.786.780	5,56	323.108.070	43,00
1996	857.022.580	55.068.010	6,42	342.431.750	39,96
1997	971.810.680	56.397.940	5,80	397.735.250	40,92
1998	1.398.104.420	80.278.150	5,74	626.140.900	44,78
1999	1.577.141.940	99.168.030	6,28	700.375.230	44,40
2000	1.719.867.200	109.786.840	6,38	751.102.120	43,67
2001	1.956.676.130	125.187.760	6,39	844.908.050	43,18
2002	2.202.846.100	141.098.890	6,41	922.395.720	41,87

Sumber: Kabupaten Ngawi Dalam Angka, BPS, berbagai tahun.

Berdasarkan data penerimaan dari sektor industri berdasar harga berlaku diatas menunjukkan bahwa tahun 1994 sumbangan sektor industri sebesar 5,62 %, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 6,41 %. Sedangkan pada harga dasar

konstan 1993 sumbangan sektor industri sebesar 5,98 % meningkat menjadi 6,15 % pada tahun 2002.

Pada tahun 1994 sumbangan sektor industri atas dasar harga berlaku sebesar 5,62 % sedang sektor pertanian sebesar 44,07 %, angka tersebut mengalami kenaikan untuk sektor industri sebesar 6,41 % pada tahun 2002 sedang sektor pertanian pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 41,87 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya arah pergeseran yang membaik untuk perkembangan industri kecil.

Bila dibandingkan dengan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB, memang sektor industri masih lebih rendah peranannya, namun semenjak tahun 2000 sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB mengalami penurunan. Hal tersebut semakin baiknya peran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Cabang Ngawi dalam membina usaha industri di Kabupaten Ngawi.

Berdasar tabel 5.4. dan tabel 5.5. terlihat bahwa kemajuan sektor industri semakin besar terhadap PDRB. Di dalam tabel tampak bahwa sektor industri semakin strategis peranannya dalam perekonomian Kabupaten Ngawi, serta pada masa akan datang dapat dijadikan andalan dalam penerimaan PDRB Kabupaten Ngawi.

5.4. Peran Industri Kecil Dalam Menyerap Angkatan Kerja

Potensi sektor industri kecil yang banyak terdapat di Kabupaten Ngawi merupakan salah satu andalan dalam menyerap tenaga kerja, selain sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri kecil dari tahun 1994 – 2002 mengalami kenaikan yang cukup baik. Ini terlihat dari tabel 5.6.,

pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 32.841 orang meningkat menjadi 35.891 pada tahun 2002.

Untuk lebih jelasnya tabel 5.6. berikut ini menggambarkan perkembangan tenaga kerja industri kecil, perkembangan angkatan kerja serta perbandingan persentase penyerapan angkatan kerja oleh sektor industri kecil dan sektor pertanian di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 1994 – 2002.

Tabel 5.6.
Perkembangan Tenaga Kerja Industri Kecil, Angkatan Kerja serta Perbandingan Persentase Penyerapan Angkatan Kerja oleh Sektor Industri Kecil dan Sektor Pertanian di Kabupaten Ngawi tahun 1994 – 2002.

Tahun	Tenaga Kerja I.K	Persentase Pertambahan	Angkatan Kerja	Ang Kerja terserap I.K (%)	Ang Kerja Sektor Pertanian (%)
1994	32.841	-	420.663	7,80	55,31
1995	32.943	0,31	424.955	7,75	55,00
1996	33.512	1,72	428.771	7,81	54,84
1997	34.635	3,35	433.320	7,99	54,56
1998	35.218	1,68	438.095	8,03	54,38
1999	33.447	-4,97	443.415	7,54	54,09
2000	33.731	0,84	449.483	7,50	53,65
2001	34.995	3,74	454.694	7,69	53,60
2002	35.891	2,56	455.538	7,87	53,57

Sumber: Deperindag, Badan Pusat Statistik Ngawi, berbagai tahun.

Berdasar data diatas, dapat dilihat bahwa persentase pertambahan tertinggi pada tahun 2001 sebesar 3,74 % pertambahan tenaga kerja 1264 orang, sedang persentase pertambahan terkecil terjadi pada tahun 1999 yaitu - 4,97 % dengan pengurangan sebesar 1771 orang, di mana pada saat itu kondisi perekonomian kita baru menghadapi gejolak semenjak adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia,

kondisi juga sama dihadapi oleh sektor selain industri kecil yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Pada awal 1997 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri kecil mengalami peningkatan seiring banyaknya perusahaan yang bangkrut mendorong para pencari kerja untuk bekerja pada industri kecil tersebut. Angka yang menunjukkan peningkatan dari 33.512 orang pada tahun 1996 menjadi 34.635 pada tahun 1997 menyiratkan bahwa kondisi perekonomian kita mulai goncang, yang mendorong untuk bekerja pada sektor tersebut dari pada bekerja diluar sektor industri kecil.

Pada tahun 1998 peningkatan pekerja pada sektor industri menunjukkan bahwa banyaknya perusahaan yang bangkrut akibat krisis. Angka menunjukkan jumlah tenaga kerja 35.218 orang, pada tahun 1997 sebesar 34.635 orang peningkatannya sebesar 583 orang. Pada periode 1998 menunjukkan jumlah angkatan kerja sebesar 438.320 orang sektor industri kecil mampu menyerap 8,03 % angkatan kerja dibandingkan dengan tahun 1997 yang menyerap 7,99 % dari total angkatan kerja. Berdasar data tabel 5.6. terlihat bahwa persentase penyerapan angkatan kerja oleh sektor industri kecil yang terbesar terjadi pada tahun 1998 yaitu 8,03 % dan persentase angkatan kerja terkecil terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 7,50 %.

Bila di bandingkan dengan sektor pertanian, memang sektor industri kecil masih lebih rendah dalam menyerap angkatan kerja, namun kemampuan sektor pertanian dalam menyerap angkatan kerja terus mengalami penurunan. Pada tahun 1994 sektor pertanian mampu menyerap angkatan kerja sebesar 55,31 % dan turun menjadi 53,57 % pada tahun 2002.

Berdasar tabel 5.6. tersirat bahwa peran industri kecil dalam menyerap angkatan kerja semakin nyata dan penting peranannya. Panyerapan angkatan kerja sektor Industri dari tahun 1994 – 2002 menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 7,80 % menjadi 7,87 % meskipun penyerapannya berfluktuasi. Dilihat dari perkembangan penyerapan angkatan kerja sektor industri kecil tersebut pada masa akan datang dapat dijadikan andalan untuk menggantikan sektor pertanian dalam menyerap angkatan kerja yang pada saat ini memerlukan pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka.

5.5. Perkembangan Industri Kecil

Kabupaten Ngawi yang letaknya paling ujung barat dari Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 17 Kecamatan. Dilihat dari letak geografis tersebut maka daerah Ngawi adalah daerah yang berhutan jati serta lahan pertanian, maka banyak potensi yang perlu dikembangkan guna peningkatan industri kecil khususnya bagi peningkatan penghasilan para penduduknya.

Pembangunan industri di Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mengembangkan industri yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan nilai jual diluar wilayah Ngawi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antar industri serta antar sektor ekonomi, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Potensi sektor terbesar di Kabupaten Ngawi yang terbesar adalah kelompok industri kecil, untuk industri besar dan menengah kurang berkembang di Kabupaten Ngawi karena ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri besar dan menengah berada di wilayah yang relatif dekat dengan pusat kota dan memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Kelompok industri kecil keberadaannya menyebar pada 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi yang cenderung wilayahnya banyak pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil lebih banyak berkembang di wilayah pedesaan yang relatif tidak memerlukan sarana dan prasarana sebagaimana yang dibutuhkan oleh industri besar dan menengah. Selain itu, industri kecil di Kabupaten Ngawi merupakan usaha dari rakyat setempat dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut.

5.5.1. Perkembangan Unit Usaha

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, Perkembangan unit usaha industri kecil di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan yang sangat baik. Ini dapat terlihat dari tabel 5.7. dimana pada tahun 1994 jumlah unit usaha sebanyak 12.188 dan pada tahun 1999 jumlah unit usaha sebanyak 12.929 unit sama pada tahun 1998, hal ini terjadi disebabkan kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi. Pada tahun 2002 jumlah unit usaha mengalami kenaikan menjadi 13.737 unit.

Tabel 5.7.
Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 – 2002

Tahun	Unit Usaha	Pertambahan Unit Usaha	Persentase Pertambahan (%)
1994	12.188	-	-
1995	12.318	130	1,06
1996	12.529	211	1,71
1997	12.560	31	0,24
1998	12.929	369	2,93
1999	12.929	0	1,00
2000	12.687	-242	-8,12
2001	13.498	811	6,39
2002	13.737	239	1,77

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, berbagai tahun.

Dari tabel 5.7. di atas dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah unit usaha terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 811 unit usaha atau 6,39 %. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu -242 unit usaha atau mengalami penurunan sebesar -8,12 %.

Bila di lihat dari persentase pertambahan unit usaha dari tabel 5.7. tidak merata (*berfluktuasi*), dari tahun 1994 sampai tahun 2002 persentase pertambahan unit usaha mengalami kenaikan pada tahun 2002, yaitu dari 1,06 % pada 1994 naik menjadi 1,77 % pada tahun 2002. Di dasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 1995 sampai tahun 1998 persentase pertambahan naik,yaitu dari 1,06 % menjadi 2,93% pada tahun 1998 serta mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,92 % pertahun.

Tingginya pertambahan unit usaha pada tahun 2001 tidak lepas dari semakin baiknya kondisi perekonomian Indonesia serta daya beli masyarakat akan

produksi industri kecil yang mengalami kenaikan. Selama tahun 2000 adanya usaha dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi yang melakukan pembinaan setelah pada tahun 2000 mengalami penurunan unit usaha sebesar minus 8,12%. Program tersebut berupa program pembinaan usaha pada desa kerajinan dan desa kerajinan mandiri serta adanya kebijakan dari Bangdes untuk memberikan pinjaman permodalan guna peningkatan unit usaha.

5.5.2. Perkembangan Sentra Industri Kecil

Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil di Ngawi dilakukan melalui jalur sentra usaha industri kecil. Melalui cara ini selain untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, juga diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan wilayah setempat dengan sentra industri kecil tersebut sebagai pusat pertumbuhan.

Pekembangan sentra usaha industri kecil mengalami peningkatan yang cukup berarti. Ini terlihat dari tabel 5.8. di mana pada tahun 1994 jumlah sentra usaha yang dibina adalah sebesar 31 sentra usaha meningkat menjadi 46 sentra usaha pada tahun 2002.

Bila dilihat persentase pertambahan, dari data tabel 5.8. terlihat bahwa persentase pertambahannya selalu turun. Pada tahun 1994 persentase pertambahannya yaitu 6,45 % naik menjadi 9,52 % pada tahun 2002, dimana nilai produksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.202.845.000,00. Sedangkan pada tahun 1996 persentase pertambahannya mengalami penurunan sebesar 2,12 %, pada tahun 1997 naik menjadi 5,40 %, selanjutnya mengalami penurunan tahun 1998 sebesar 2,56 %

akibat dari krisis ekonomi di Indonesia, bahkan pada tahun 1999 mencapai minus 9,00 %, persentase pertambahan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 9,52 % dengan pertambahan sentra industri sebanyak 4 sentra usaha industri kecil, sedang persentase pertambahan terendah terjadi pada tahun 1996 sebesar 2,12 % dan tahun 1998 sebesar 2,56 % dan dengan pertambahan sentra industri sebanyak 4 sentra usaha industri kecil pada tahun 1996 dan tahun 1998 sebanyak 1 unit usaha.

Untuk lebih jelasnya, tabel 5.8. berikut ini menggambarkan perkembangan sentra usaha industri di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 1994 – 2002.

Tabel 5.8.
Perkembangan Sentra Usaha Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 – 2002

Tahun	Sentra Industri Kecil	Pertambahan Sentra Industri Kecil	Persentase Pertambahan (%)
1994	31	-	-
1995	33	2	6,45
1996	37	4	2,12
1997	39	2	5,40
1998	40	1	2,56
1999	36	- 4	-9,00
2000	39	3	8,33
2001	42	3	7,69
2002	46	4	9,52

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, 1994-2002.

5.5.3. Perkembangan Nilai Investasi

Sejalan dengan perkembangan unit usaha, maka investasi pada sektor industri kecil juga mengalami peningkatan. Perkembangan investasi pada industri kecil mengalami peningkatan pada mulai tahun 1994 – 2002, yang mana pada tahun 1994 nilai investasi pada sektor industri kecil sebesar Rp. 1.992.518.000,00 meningkat menjadi sebesar Rp. 19.959.220.000,00 pada tahun 2002, pada tahun 2000 nilai investasi industri kecil mengalami peningkatan yang sangat baik semenjak adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari setiap pengusaha industri kecil. Peningkatan tersebut adalah, Rp. 19.584.629.000,00 pada tahun 2000, tahun 2001 adalah Rp. 19.899.420.000,00 kenaikannya sebesar Rp. 314.791.000,00 sedangkan nilai investasi pada tahun 2002 Rp. 19.959.220.000,00 kenaikan sebesar Rp. 59.800.000,00.

Tabel 5.9.
Perkembangan Nilai Investasi Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 – 2002

Tahun	Nilai Investasi (000)	Peningkatan Nilai Investasi (000)	Persentase Peningkatan
1994	1.992.518	-	-
1995	2.481.330	488.812	4,53
1996	3.004.867	523.537	1,09
1997	3.105.189	100.322	3,33
1998	3.237.779	132.590	4,26
1999	3.328.827	91.048	2,81
2000	19.584.629	16.255.802	88,33
2001	19.899.420	314.791	1,60
2002	19.959.220	59.800	0,30

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, berbagai tahun.

Peningkatan nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan peningkatan sebesar Rp. 16.225.802.000,00 dengan peningkatan persentasenya sebesar 88,33 %. Jika dilihat pada tabel 5.9. sebenarnya pada tahun 1995 persentasenya sebesar 4,53 % mengalami penurunan sampai sebesar 1,09 % pada tahun 1996 kemudian naik menjadi 3,33 % pada tahun 1997, dan kenaikan persentase pada tahun 1998 sebesar 4,26 %, bahkan tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 0,30 % dengan nilai investasi turun menjadi Rp. 59.800.000,00 persentase peningkatan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0,30 % dengan nilai investasi sebesar Rp. 19.959.220.000,00.

5.5.4. Perkembangan Nilai Produksi

Dengan dilaksanakannya berbagai program pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan usaha oleh instansi atau departemen yang terkait dengan industri kecil, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya nilai produksi yang dihasilkan sektor industri kecil.

Nilai produksi pada sektor industri kecil terus mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 1994 nilai produksi yang semula Rp. 53.834.227.000,00 meningkat menjadi Rp. 68.202.845.000,00 pada tahun 2002. Pada tahun 1999 nilai produksi mengalami penambahan yang sedikit sebesar Rp. 762.041.000,00 akibat dari dampak krisis yang terjadi.

Tabel 5.10.
Perkembangan Nilai Produksi Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 -2002.

Tahun	Nilai Produksi (000)	Peningkatan Nilai Produksi (000)	Persentase Peningkatan (%)
1994	53.834.227	-	-
1995	54.793.106	958.879	1,78
1996	55.627.518	834.412	1,52
1997	56.704.911	1.077.393	1,93
1998	57.983.403	1.278.492	2,25
1999	58.745.444	762.041	1,31
2000	59.914.135	1.168.691	1,98
2001	64.224.084	4.309.949	7,19
2002	68.202.845	3.978.761	6,19

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, berbagai tahun.

Peningkatan nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan nilai peningkatan sebesar Rp. 4.309.949.000,00 sedang peningkatan terendah terjadi pada tahun 1999 dengan jumlah peningkatan Rp. 762.041.000,00.

Bila dilihat dari persentase peningkatan nilai produksi industri kecil, dari tabel 5.10. terlihat bahwa persentase peningkatan selalu naik turun atau berfluktuasi. Pada tahun 1995 persentase peningkatan mencapai angka 1,78 % dan turun menjadi sebesar 1,52 % pada tahun 1996, hal demikian (persentase peningkatan nilai produksi naik turun) terus terjadi sampai pada tahun 2002. Persentase peningkatan nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 7,19 % dengan peningkatan nilai produksi sebesar Rp. 4.309.949.000,00 disebabkan pada tahun 2001 kondisi perekonomian menunjukkan arah perbaikan yang baik, sedang persentase peningkatan terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 1,31%

dengan peningkatan nilai produksi sebesar Rp. 762.041.000,00 hal tersebut terjadi karena efek dari krisis yang melanda Indonesia.

5.5.5. Perkembangan Nilai Tambah

Perkembangan nilai tambah pada sektor industri kecil mengalami peningkatan yang cukup menjanjikan. Peningkatan yang terjadi menggambarkan bahwa sektor industri kecil semakin nyata menjadi andalan bagi Kabupaten Ngawi, perkembangan yang terjadi terlihat dalam tabel 5.11. di mana pada tahun 1994 nilai tambah industri kecil sebesar Rp. 22.821.539.000,00 meningkat menjadi Rp. 26.706.406.000,00 pada tahun 2002.

Tabel 5.11.
Perkembangan Nilai Tambah Industri Kecil di Kabupaten Ngawi
Tahun 1994 -2002

Tahun	Nilai Tambah (000)	Peningkatan Nilai Tambah (000)	Persentase Peningkatan (%)
1994	22.821.539	-	-
1995	23.050.335	228.796	1,00
1996	23.302.904	252.569	1,09
1997	23.888.044	585.140	2,51
1998	24.183.338	295.294	1,23
1999	24.006.648	-176.690	-9,26
2000	24.100.942	94.294	0,39
2001	25.357.695	1.256.753	5,21
2002	26.706.406	1.348.711	5,31

Sumber: Laporan Tahunan Deperindag Ngawi, berbagai tahun.

Berdasar tabel 5.11. peningkatan nilai tambah tertinggi terjadi pada tahun 2002 dengan peningkatan sebesar Rp. 1.348.711.000,00 sedang peningkatan terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar Rp. -176.690.000,00.

Bila dilihat dari persentase peningkatan nilai tambah industri kecil, dari data tabel terlihat bahwa persentase penambahannya mengalami naik turun. Pada tahun 1995 persentase pertambahan mencapai angka 1,00 % dan naik menjadi 1,09 % pada tahun 1996, kemudian pada tahun 1997 mengalami kenaikan sebesar 2,51 % dan pada tahun 1998 turun lagi menjadi 1,23 %. Pada tahun 1999 kembali mengalami penurunan sebesar -9,26 % tetapi pada tahun 2000 mengalami kenaikan 0,39 %, pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 5,21 %, kemudian mengalami kenaikan sebesar 5,31 % seiring membaiknya perekonomian nasional dan usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna peningkatan output produksi bagi industri kecil.

Persentase peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 5,31 % dengan nilai tambah sebesar Rp. 1.348.711.000,00 sedang persentase peningkatan terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar -9,26 % dengan peningkatan nilai tambah sebesar Rp. -176.690.000,00.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada data-data serta pembahasannya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri kecil, masih terbatas pada penyediaan permodalan serta penciptaan iklim usaha yang bersifat kondusif walaupun hal tersebut belum maksimal bagi industri kecil, sedang pemerintah daerah lebih pada bersifat teknis, seperti peningkatan kemampuan usaha, berproduksi, penetapan skala prioritas, promosi, informasi dan pemasaran, pencegahan pencemaran lingkungan serta mengembangkan program kemitraan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan akses terhadap permodalan, telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dengan makin banyaknya unit-unit usaha baru industri kecil serta makin besarnya nilai investasi yang ditanamkan pada sektor industri kecil.
3. Sumbangan sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku 1993 terus mengalami peningkatan, begitu juga sumbangan sektor industri kecil, sedangkan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan, meskipun di Kabupaten Ngawi adalah daerah agraris.

4. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri kecil terus mengalami peningkatan, sedangkan kemampuan sektor pertanian dalam menyerap angkatan kerja mengalami kenaikan tapi tidak terlalu besar.
5. Pola pembinaan dengan sistem keterkaitan Bapak Angkat-Mitra Usaha yang telah dilakukan kurang maksimal, hal ini terlihat masih kecilnya penambahan Bapak Angkat yang bekerjasama dengan mitra usaha industri kecil.
6. Dari dua poin di atas, yaitu peran industri kecil dalam pembentukan PDRB, dan peran industri kecil dalam menyerap angkatan kerja dapat diinterpretasikan bahwa peran sektor industri kecil semakin nyata dalam perekonomian Kabupaten Ngawi dan menjadi salah satu sektor penunjang dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Perkembangan industri kecil terus mengalami peningkatan, baik untuk unit usaha, sentra usaha, nilai investasi, nilai produksi serta nilai tambah. Tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada nilai investasi, dengan laju pertumbuhan rata-rata 13,28 %, sedang pertumbuhan rata-rata terendah terjadi pada tenaga kerja, dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,39 %.

6.2. Saran

Dari seluruh proses penelitian industri kecil ini, banyak hal-hal yang memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut. Dalam rangka pengembangan industri kecil di Kabupaten Ngawi peneliti menyarankan:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih mempererat hubungan dengan lembaga, instansi lain serta mengikutsertakan mereka dalam merumuskan strategi kebijakan dan kegiatan pembinaan industri kecil, seperti; KADIN, Kebijakan dari Bagian Perekonomian Daerah, Bangdes, serta instansi terkait.
2. Pemerintah khususnya pihak perbankan, hendaknya mempermudah persyaratan-persyaratan kredit dan jalur birokrasi bagi industri kecil, sehingga usaha industri kecil yang menggunakan fasilitas kredit perbankan semakin mudah, luas dan merata bagi keseluruhan industri kecil.
3. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembinaan dan pengembangan industri kecil dengan sistem keterkaitan antar sektor industri maupun dengan sektor ekonomi lainnya, melalui pola dan sistem Bapak Angkat - Anak Angkat dapat berjalan maksimal yaitu: saling menguntungkan dan memperkuat atau tidak terjadi eksploitasi yang besar terhadap yang kecil.
4. Diantara lembaga atau instansi yang membina perlu penyeragaman mengenai definisi industri kecil, sehingga dalam merumuskan strategi, kebijakan dan dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terkoordinasi.

5. Perlu dibentuk lembaga atau organisasi pengusaha industri kecil, sebagai wadah bagi para pengusaha industri kecil untuk berkomunikasi dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Dengan adanya lembaga atau organisasi ini kedudukan pengusaha industri kecil akan semakin kuat.
6. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, pola pembinaan pengembangan industri kecil yang dilaksanakan melalui jalur sentra usaha industri kecil perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Melalui pola ini, selain untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, juga program pembinaan dan pengembangan industri kecil yang memiliki kelompok usaha sejenis dapat dilakukan ditempat mereka tinggal yang akhirnya dapat memberikan dampak lebih luas bagi pengembangan wilayah tersebut, dengan sentra usaha industri kecil sebagai pusat pertumbuhan.
7. Usaha dari pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu adanya sensus yang lebih akurat agar tersedia data yang lebih baik.